SUARA PEMRED

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2021

Hal.: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Opini WTP Berturut-turut Tujuh Kali Sejak 2014

Pemkab Ketapang mendapatkan penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan bukan hanya untuk Bupati, tapi penghargaan ini untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Ketapang. Serta tentu menjadi kebanggaan masyarakat dan daerah Ketapang secara keseluruhan

KETAPANG, SP – Sejak tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang telah tujuh kali berturut-turut menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian itu diganjar penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indinesia (RI).

Piagam penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Imik Eko Putro dan diterima langsung Bupati Ketapang, Martin Rantan di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Selasa (2/11).

"Terimakasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalbar, yang pagi ini tiba di Ketapang untuk menyerahkan piagam penghargaan Opini WTP atas LKPD Pemkab Ketapang Tahun Anggaran 2020," ucap Bupati saat menyampaikan kata sambutan dalam acara tersebut.

Kemenkeu memberikan penghargaan ini kepada daerah yang LKPD-nya mendapat Opini WTP, minimal lima kali berturut-turut.

"Pemkab Ketapang mendapatkan penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan bukan hanya untuk Bupati, tapi penghargaan ini untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Ketapang. Serta tentu menjadi kebanggaan masyarakat dan daerah Ketapang secara keseluruhan," ujarnya.

Bupati mengungkapkan, Pemkab Ketapang telah tujuh kali berturut turut menerima Opini WTP mulai tahun anggaran 2014. Sesuai ketentuan yang berlaku, penyusunan LKPD Pemkab Ketapang terdiri dari beberapa laporan. Yakni laporan realisasi anggaran, neraca per 31 Desember 2020 dan laporan operasional.

Kemudian laporan arus kas, laporan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

"Ketujuh laporan tersebut telah dilakukan audit terinci oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) RI yang berkahir pada Mei 2021 lalu," kata Bupati.

"Demikian pula kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketapang, agar memprogramkan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan daerah yang ada di semua organisasi perngkat daerah," pesan Bupati.

Bupati mengungkapkan, Opini WTP dari BPK RI merupakan cita-cita, harapan bersama dan tanggungjawab kepada masyarakat Ketapang. Penghargaan yang telah diterima Pemkab Ketapang ini memiliki kewajiban untuk menjalankan tata kelola keuangan daerah yang baik dan akuntabel.

"Capaian ini merupakan perjalanan panjang dalam membangun tata kelola keuangan. Serta dilakukan secara baik dan benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Mempertahan Opini WTP pada tahun mendatang, Bupati mengimbau agar OPD, khususnya melalui Inspektorat Ketapang selaku koordinator dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, agar berupaya melakukan penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan secara maksimal dan berkelanjutan.

SUARA PEMRED

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2021

Hal.: 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Bupati juga meminta OPD agar melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian intern Pemkab Ketapang, penyesuaian semua regulasi, peningkatan sistem dan aplikasi penyempurnaan yang berkaitan seluruh dengan pengelola keuangan daerah, khususnya dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

IST

PENGHARGAAN – Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro menyerahkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indinesia kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, Selasa (2/11). Penghargaan diterima langsung Bupati Ketapang, Martin Rantan di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang.

Berkaitan dengan Dana Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Bupati berharap para kepala OPD dalam mengelola anggaran melakukan upaya dan langkah-langkah maksimal melaksanakan kegiatan, dan penyerapan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya tegaskan menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap dapat mempertahankan predikat Opini WTP pada tahun-tahun mendatang. Sejalan dengan itu, kami harapkan agar kepala OPD beserta jajarannya dapat mendukung dalam mempertahankan predikat Opini WTP ini," tuturnya.

Bupati mengajak seluruh jajaran OPD Ketapang bekerja sama dengan baik. Sehingga penyajian laporan keuangan daerah transparan dan akuntable, serta dapat dilaksanakan dan patuh kepada asas aturan yang ada.

"Mari kita bekerja dengan mengedepankan integritas, bekerja keras untuk mempertahan Opini WTP ini," tukasnya.(**teo/pk**)